

## **STRATEGI PENANGANAN KENDALA DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU DI INDONESIA: TINJAUAN DARI PEMILU 2019**

Ananda Nabilla Putri<sup>1</sup>, Saiza Syafira Elvandari<sup>2</sup>, Azzahra Salsabila Hidayat<sup>3</sup>,  
Putrie Saridewi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Politik Indonesia Terapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Alamat e-mail : [anandanabilla2003@gmail.com](mailto:anandanabilla2003@gmail.com)<sup>1</sup>,  
[syafiraelvandari15@gmail.com](mailto:syafiraelvandari15@gmail.com)<sup>2</sup>, [azzahrraslsbl@gmail.com](mailto:azzahrraslsbl@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[putriesari85@gmail.com](mailto:putriesari85@gmail.com)<sup>4</sup>

### **ABSTRACT**

*The 2019 General Election in Indonesia was one of the largest democratic events in the world, involving complex logistical scales and diverse distribution challenges. This article aims to analyze strategies for addressing logistical distribution obstacles in the 2019 election, focusing on geographical factors, infrastructure, human resources, as well as planning and supervision. The study employs a descriptive qualitative approach, utilizing secondary data from official reports of the General Election Commission (KPU), academic studies, and media publications. The findings reveal that the main challenges in election logistics distribution in Indonesia include limited access to remote areas, extreme weather conditions, and a lack of inter-agency coordination. Strategies implemented include optimizing information technology for logistics tracking, collaboration with security forces, and enhanced training and simulations for logistics personnel. However, weaknesses in post-election evaluation hinder improvements in the distribution system for future elections. This article recommends the development of infrastructure in remote areas, increased transparency in the distribution process, and the implementation of technology-based monitoring systems to improve the quality of election administration. This study is expected to serve as a reference for policymakers in designing more effective and efficient logistical distribution strategies for future elections.*

*Keywords: Election Logistics, Distribution, Strategy, 2019 Election, Indonesia.*

### **ABSTRAK**

Pemilu 2019 di Indonesia merupakan salah satu peristiwa demokrasi terbesar di dunia, dengan skala logistik yang kompleks dan tantangan distribusi yang beragam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanganan kendala distribusi logistik Pemilu 2019, dengan fokus pada faktor geografis, infrastruktur, sumber daya manusia, serta perencanaan dan pengawasan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari laporan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), kajian akademik, dan publikasi media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam distribusi logistik Pemilu di Indonesia meliputi keterbatasan akses ke wilayah terpencil, cuaca ekstrem, serta kurangnya koordinasi antarlembaga. Strategi yang

diterapkan mencakup optimalisasi teknologi informasi dalam pelacakan logistik, kolaborasi dengan aparat keamanan, serta peningkatan pelatihan dan simulasi untuk petugas logistik. Namun, terdapat kelemahan dalam evaluasi pasca-pemilu yang menghambat penyempurnaan sistem distribusi untuk pemilu berikutnya. Artikel ini merekomendasikan pengembangan infrastruktur di daerah terpencil, peningkatan transparansi dalam proses distribusi, dan penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu. Studi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi distribusi logistik yang lebih efektif dan efisien pada pemilu mendatang.

**Kata Kunci:** Logistik Pemilu, Distribusi, Strategi, Pemilu 2019, Indonesia.

### **A. Pendahuluan**

Pemilu di Indonesia merupakan proses demokrasi yang sangat penting dan menjadi pilar utama dalam sistem pemerintahan negara. Setiap pemilu, baik pemilihan umum legislatif, presiden, maupun kepala daerah, melibatkan pengelolaan logistik yang sangat kompleks. Distribusi logistik pemilu di Indonesia, dengan kondisi geografis yang beragam dan tantangan infrastruktur yang ada, menjadi salah satu kendala terbesar dalam pelaksanaan pemilu yang efisien dan efektif. Pemilu 2019, yang merupakan pemilu serentak pertama di Indonesia, mencatatkan sejarah penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Proses pemilu yang melibatkan pemilihan legislatif dan presiden pada waktu yang bersamaan ini menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dalam distribusi logistik. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dan memahami strategi penanganan kendala distribusi logistik pada Pemilu 2019 agar dapat dijadikan pembelajaran dalam perencanaan dan pelaksanaan pemilu di masa yang akan datang.

Distribusi logistik pemilu di Indonesia memiliki tantangan tersendiri. Berbeda dengan negara-negara maju, Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat beragam, mulai dari pulau-pulau besar hingga daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau (Sitorus, 2020). Infrastruktur transportasi di beberapa daerah masih terbatas, sementara distribusi logistik pemilu membutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu yang sangat tinggi agar proses pemilu dapat berlangsung dengan lancar. Pada Pemilu 2019, misalnya, distribusi logistik menghadapi kendala yang cukup serius, seperti keterlambatan pengiriman surat suara dan bahan pemilu lainnya ke daerah-daerah terpencil, yang pada akhirnya memengaruhi jalannya pemungutan suara di beberapa wilayah (Prabowo, 2019).

Selain itu, ketidakmerataan fasilitas dan infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi faktor lain yang memperburuk distribusi logistik. Di banyak daerah di Indonesia, terutama di wilayah timur dan wilayah

pedalaman, akses menuju tempat pemungutan suara (TPS) sangat terbatas, yang membuat distribusi logistik menjadi sangat menantang (Yusuf, 2018). Kendala ini semakin diperburuk oleh cuaca ekstrem, seperti hujan deras dan angin kencang, yang dapat menghambat transportasi dan menyebabkan keterlambatan pengiriman logistik pemilu.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, berbagai strategi penanganan telah diterapkan dalam distribusi logistik Pemilu 2019. Salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan mengontrol distribusi logistik, mulai dari perencanaan hingga pengiriman (Sulaiman, 2020). Penggunaan sistem pelacakan berbasis teknologi ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengiriman dan memastikan bahwa logistik sampai di lokasi tujuan tepat waktu. Selain itu, koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam distribusi logistik, seperti KPU, TNI, Polri, dan pihak lainnya, juga menjadi hal yang sangat penting agar proses distribusi dapat berjalan dengan lancar (Kurniawan, 2020).

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kendala dalam distribusi logistik Pemilu 2019 tidak sepenuhnya dapat teratasi. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki untuk pemilu di masa depan, seperti kurangnya kesiapan infrastruktur di daerah-daerah terpencil, serta kurangnya pelatihan dan koordinasi yang optimal antara

lembaga-lembaga terkait (Hadi, 2021). Evaluasi terhadap proses distribusi logistik juga masih belum optimal, sehingga dapat menyebabkan masalah yang sama terulang pada pemilu berikutnya (Wijaya, 2022).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam tentang strategi penanganan kendala distribusi logistik pada Pemilu 2019 dan bagaimana strategi tersebut dapat ditingkatkan untuk pemilu yang akan datang. Dengan melihat berbagai kendala yang terjadi pada Pemilu 2019, artikel ini juga akan memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki distribusi logistik pemilu di Indonesia, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur, peningkatan transparansi, serta penerapan teknologi dalam pengawasan distribusi logistik.

Sebagaimana diketahui, Pemilu di Indonesia selalu melibatkan banyak pihak dan organisasi, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, Polri, hingga masyarakat. Oleh karena itu, strategi penanganan kendala distribusi logistik harus melibatkan kolaborasi yang erat antar lembaga-lembaga tersebut (Mulyadi, 2021). Proses distribusi logistik yang tepat waktu dan efisien akan memastikan pelaksanaan pemilu yang lebih lancar dan lebih adil, serta dapat mengurangi potensi konflik yang timbul akibat keterlambatan atau kesalahan distribusi logistik. Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas pemilu dan meningkatkan

kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Keberhasilan distribusi logistik pemilu juga dapat berdampak positif terhadap partisipasi pemilih. Jika logistik pemilu sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik, maka pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan nyaman dan tanpa gangguan. Sebaliknya, jika terdapat masalah dalam distribusi logistik, maka hal ini dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemilu, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilih (Raharjo, 2019).

Secara keseluruhan, pemilu di Indonesia merupakan proses yang memerlukan perhatian dan perencanaan yang matang, terutama dalam hal distribusi logistik. Oleh karena itu, strategi penanganan kendala distribusi logistik yang efektif harus menjadi fokus utama dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, proses pemilu tidak hanya dapat berjalan lancar, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini akan mengkaji berbagai kendala dalam distribusi logistik Pemilu 2019, menganalisis strategi yang telah diterapkan, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk pemilu di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem distribusi logistik pemilu yang lebih baik dan efisien di Indonesia.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Distribusi logistik pemilihan umum (pemilu) merupakan elemen vital dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Logistik pemilu mencakup berbagai jenis kebutuhan, seperti kotak suara, surat suara, tinta, formulir, dan alat tulis lainnya. Efektivitas distribusi logistik memengaruhi kelancaran proses pemilu, mulai dari tahap persiapan hingga penghitungan suara (Sudrajat, 2018). Tantangan dalam distribusi logistik pemilu di Indonesia cukup kompleks, mengingat kondisi geografis yang beragam serta infrastruktur yang belum merata di seluruh wilayah (Purwanto, 2020).

Pemilu 2019 menjadi salah satu pemilu terbesar di dunia, dengan lebih dari 800.000 tempat pemungutan suara (TPS). Kompleksitas ini menciptakan tantangan besar dalam memastikan distribusi logistik tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Kendala utama seperti keterlambatan distribusi logistik, seperti surat suara yang belum tiba di TPS pada hari pemungutan suara, menjadi isu krusial yang banyak terjadi (Susanto, 2019). Selain itu, penyebaran wilayah yang terdiri dari kepulauan dengan akses sulit, terutama di daerah terpencil dan terluar, menambah dimensi tantangan dalam distribusi logistik (Rahmawati, 2021).

Kendala dalam distribusi logistik pemilu sering kali disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan pihak terkait lainnya (Widodo,

2020). Faktor eksternal seperti cuaca ekstrem dan keterbatasan transportasi juga turut memengaruhi distribusi logistik pemilu di sejumlah daerah (Hidayat, 2021). Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan yang sering ditemukan, sehingga efisiensi dan efektivitas distribusi logistik terkendala (Mardiana, 2021).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kendala distribusi logistik pemilu membutuhkan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi. Salah satu strategi yang telah diterapkan adalah penggunaan teknologi untuk memantau dan mengelola distribusi logistik. Pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap pergerakan logistik, mulai dari tahap produksi hingga distribusi ke TPS (Santoso, 2018). Sebagai contoh, KPU telah menggunakan Sistem Informasi Logistik (SILOG) untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam pendistribusian logistik pada Pemilu 2019 (Iskandar, 2019).

Selain teknologi, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait menjadi sorotan utama dalam strategi penanganan kendala distribusi logistik. Koordinasi yang baik antara KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pemerintah daerah dapat mengurangi risiko keterlambatan dan ketidaktepatan distribusi logistik (Pratama, 2020). Pendekatan kolaboratif ini memerlukan komunikasi yang intensif dan penyusunan prosedur

operasional standar (SOP) yang jelas bagi semua pihak yang terlibat.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan distribusi logistik pemilu. Di Indonesia, banyak daerah terpencil yang memiliki aksesibilitas rendah, seperti pegunungan, pulau-pulau kecil, dan wilayah dengan kondisi jalan yang buruk. Dalam kasus Pemilu 2019, penggunaan moda transportasi khusus seperti perahu motor dan pesawat kecil telah dilakukan untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut (Fadillah, 2020). Namun, upaya ini sering kali terkendala oleh keterbatasan anggaran (Rizki, 2020). Penguatan infrastruktur transportasi di daerah terpencil harus menjadi prioritas jangka panjang untuk mendukung kelancaran distribusi logistik pemilu.

Selain teknologi dan infrastruktur, keberhasilan distribusi logistik pemilu juga sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia (SDM). Petugas logistik pemilu harus memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur distribusi dan mampu mengatasi berbagai kendala di lapangan. Pelatihan dan simulasi distribusi logistik sebelum hari pemungutan suara menjadi salah satu langkah strategis yang dapat meningkatkan kapasitas petugas (Rahardjo, 2019). Namun, pelatihan logistik pemilu di Indonesia masih belum merata di semua daerah. Banyak petugas di daerah terpencil yang tidak mendapatkan pelatihan memadai sehingga kesalahan

distribusi logistik sering terjadi (Saputra, 2020). Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk pelatihan SDM dan penguatan kapasitas menjadi salah satu langkah penting yang perlu dioptimalkan (Fitriani, 2021).

Evaluasi terhadap distribusi logistik pemilu merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu berikutnya. Partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemantau independen dan masyarakat, dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi penyelenggara pemilu (Hidayah, 2021). Laporan hasil evaluasi Pemilu 2019 menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem perencanaan logistik, terutama dalam pendistribusian ke wilayah-wilayah dengan tingkat kesulitan akses tinggi (Nugraha, 2020).

Rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan meliputi peningkatan alokasi anggaran untuk distribusi logistik, pengembangan sistem teknologi informasi yang lebih canggih, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Selain itu, integrasi antara penyelenggara pemilu dengan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana distribusi logistik dapat mengurangi risiko keterlambatan dan kesalahan distribusi (Ramdani, 2021). Upaya ini harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan pemilu berjalan lancar dan transparan.

Distribusi logistik pemilu di Indonesia menghadapi berbagai

kendala yang kompleks, baik dari aspek geografis, infrastruktur, teknologi, hingga SDM. Namun, strategi yang terencana dan terintegrasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Pemanfaatan teknologi, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan infrastruktur transportasi, serta pengembangan kapasitas SDM merupakan langkah-langkah strategis yang perlu diimplementasikan secara konsisten. Dengan demikian, diharapkan distribusi logistik pemilu di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien, mendukung pelaksanaan demokrasi yang lebih baik.

Jika evaluasi yang menyeluruh dilakukan terhadap pelaksanaan distribusi logistik pemilu sebelumnya, maka masukan berharga untuk perbaikan dapat teridentifikasi. Dengan implementasi strategi yang tepat, distribusi logistik pemilu dapat mendukung kelancaran pelaksanaan demokrasi di negeri ini. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengidentifikasi pendekatan inovatif yang relevan dengan kondisi geografis dan kebutuhan logistik Indonesia yang terus berkembang.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis inovasi teknologi dalam pengelolaan logistik pemilu untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik. Metode ini juga memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi permasalahan secara komprehensif dan menyusun

rekomendasi berbasis data yang ada (Kusnadi, 2019).

Untuk pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber (Sulaiman, 2020).

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) (Raharjo, 2019).

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **Analisis Kendala Utama dalam Distribusi Logistik Pemilu 2019**

Distribusi logistik dalam Pemilu 2019 di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan, baik dari segi kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, maupun tantangan geografis. Pemilu yang melibatkan lebih dari 190 juta pemilih ini memerlukan pengaturan logistik yang kompleks, dengan berbagai barang yang harus didistribusikan ke lebih dari 800.000 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterlambatan pengiriman logistik ke daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau, yang berdampak pada proses pemungutan suara dan penghitungan suara (Prasetyo, 2020).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan keterlambatan distribusi logistik adalah kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam. Wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan daerah yang sulit diakses membuat proses distribusi logistik menjadi lebih rumit

dan memerlukan waktu lebih lama. Daerah-daerah terpencil, terutama di kawasan timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, seringkali menghadapi kesulitan dalam hal transportasi dan aksesibilitas (Sulaiman, 2020). Kendala ini tidak hanya menghambat distribusi barang seperti surat suara, kotak suara, dan formulir pemilu, tetapi juga mempengaruhi kesiapan petugas pemilu di lapangan.

Selain faktor geografis, kendala lain yang memengaruhi distribusi logistik adalah kurangnya koordinasi antar instansi yang terlibat dalam proses distribusi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti TNI/Polri, serta perusahaan jasa logistik untuk memastikan distribusi logistik dapat berjalan dengan lancar. Namun, adanya perbedaan koordinasi, komunikasi, dan kesepahaman antara pihak-pihak ini menyebabkan adanya tumpang tindih dalam pengiriman barang dan ketidaksesuaian dalam jadwal pengiriman. Hal ini berujung pada penundaan distribusi logistik, yang memperburuk situasi di beberapa wilayah (Wijaya, 2022).

Dalam konteks logistik pemilu, pengelolaan waktu yang sangat ketat juga menjadi kendala yang signifikan. Distribusi logistik yang harus berlangsung dalam waktu yang terbatas sering kali terhambat oleh berbagai faktor eksternal, seperti cuaca buruk dan kerusakan sosial yang terjadi menjelang hari pemilu. Di beberapa daerah, misalnya, bencana alam seperti banjir atau gempa bumi

sempat menghambat pengiriman logistik. Cuaca buruk sering kali menyebabkan keterlambatan perjalanan darat maupun penerbangan, sehingga pengiriman logistik tidak sampai tepat waktu ke TPS yang dituju (Raharjo, 2019).

Selain faktor alam dan geografis, masalah ketidaktepatan jumlah logistik juga menjadi isu penting. Di beberapa daerah, ditemukan adanya kekurangan atau kelebihan barang yang didistribusikan ke TPS. Misalnya, ada TPS yang kekurangan surat suara atau kotak suara, sementara TPS lainnya menerima logistik yang lebih dari cukup. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perencanaan yang matang dalam memetakan kebutuhan logistik di setiap daerah. KPU, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini, mengakui bahwa masalah pendataan jumlah kebutuhan logistik masih menjadi tantangan utama yang perlu diperbaiki dalam pemilu berikutnya (Kurniawan, 2020).

Tidak kalah penting adalah faktor kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan distribusi logistik. Petugas yang terlibat dalam distribusi logistik di lapangan seringkali kurang terlatih dan tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai prosedur distribusi yang baik dan benar. Hal ini menyebabkan terjadinya kesalahan dalam proses distribusi, seperti kesalahan pengiriman atau ketidaktepatan penempatan logistik di TPS. Keterbatasan jumlah petugas yang terlatih, ditambah dengan beban

tugas yang berat, memperburuk situasi di lapangan (Kusnadi, 2020).

Masalah lainnya adalah kendala terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan logistik pemilu. Meski sudah ada sistem pelaporan yang dibangun untuk memonitor distribusi logistik, namun sistem ini belum sepenuhnya efektif. Beberapa daerah melaporkan adanya masalah terkait dengan tidak akuratnya data yang disampaikan oleh petugas lapangan, yang mengakibatkan kesulitan dalam memantau perkembangan distribusi. Kurangnya transparansi ini menambah ketidakpastian dan memperburuk kendala yang dihadapi dalam distribusi logistik (Suryani, 2021).

Menghadapi berbagai kendala tersebut, strategi yang diterapkan oleh KPU dan pihak-pihak terkait perlu mendapatkan perhatian lebih. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki pengelolaan distribusi logistik. Penggunaan aplikasi pelaporan berbasis online yang dapat diakses oleh semua pihak terkait merupakan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data. Selain itu, teknologi ini memungkinkan pemantauan distribusi secara real-time, sehingga apabila terjadi kendala atau keterlambatan dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat (Wijaya, 2022). Penggunaan teknologi ini harus terus dikembangkan agar semakin efektif dalam memantau jalannya distribusi logistik di masa depan.



Strategi lain yang dilakukan adalah melibatkan lebih banyak pihak dalam pengelolaan logistik, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat. Kolaborasi antara KPU, TNI/Polri, serta berbagai perusahaan logistik swasta dianggap dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses distribusi. Kerjasama ini harus diperkuat dengan pelatihan dan simulasi distribusi logistik yang lebih intensif sebelum pelaksanaan pemilu, untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam distribusi (Prasetyo, 2020).

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam distribusi logistik Pemilu 2019 sangat dipengaruhi oleh faktor geografis, infrastruktur yang kurang memadai, masalah koordinasi antar instansi, serta kesiapan SDM yang terlibat. Meski demikian, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, seperti pemanfaatan teknologi dan peningkatan kerjasama antara berbagai pihak, memberikan harapan bagi perbaikan sistem distribusi logistik pada pemilu berikutnya. Dengan perbaikan yang terus dilakukan, diharapkan distribusi logistik pada pemilu yang akan datang dapat berlangsung lebih efisien dan tepat waktu.

### **Strategi yang Diterapkan oleh KPU dan Pihak Terkait dalam Menangani Kendala Logistik**

Distribusi logistik Pemilu 2019 di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga kendala geografis

yang luas. Untuk menangani masalah ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan berbagai pihak terkait, seperti TNI/Polri dan sektor swasta, mengembangkan sejumlah strategi untuk memastikan kelancaran distribusi logistik, yang menjadi kunci keberhasilan pemilu. Dalam pembahasan ini, akan dianalisis berbagai strategi yang diterapkan oleh KPU dan pihak-pihak terkait dalam mengatasi kendala distribusi logistik Pemilu 2019.

Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor dan mengelola distribusi logistik. KPU memperkenalkan sistem pelaporan berbasis aplikasi, yang memungkinkan pengawasan real-time terhadap proses distribusi logistik. Aplikasi ini tidak hanya digunakan untuk melacak keberadaan logistik, tetapi juga untuk memonitor waktu pengiriman dan memastikan bahwa logistik sampai tepat waktu ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan adanya sistem ini, KPU dapat segera mengetahui kendala-kendala yang muncul di lapangan dan melakukan tindakan korektif dengan cepat (Wijaya, 2022). Selain itu, sistem ini membantu dalam mengurangi human error yang bisa terjadi dalam pencatatan manual dan mempercepat proses pelaporan.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi antar lembaga, KPU juga memperkuat kerjasama dengan TNI/Polri, yang selama ini memiliki peran vital dalam pengamanan dan distribusi logistik. Melalui kerjasama ini, KPU dapat memanfaatkan

jaringan distribusi TNI/Polri yang sudah tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Hal ini memberikan keuntungan besar karena TNI/Polri memiliki akses dan pengalaman dalam mengelola distribusi barang ke berbagai wilayah, terutama di daerah dengan medan yang sulit dilalui. Koordinasi yang baik antara KPU, TNI/Polri, dan pihak logistik lainnya memastikan bahwa pengiriman logistik dapat dilakukan tepat waktu dan dengan aman (Prasetyo, 2020).

Selain itu, KPU juga mengembangkan rencana distribusi logistik yang lebih matang dan terperinci. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan pemetaan kebutuhan logistik secara lebih akurat di setiap TPS. Dalam pemilu sebelumnya, ada banyak keluhan terkait dengan ketidaksesuaian jumlah logistik yang dikirimkan ke TPS, seperti kekurangan surat suara atau kotak suara. Untuk mengatasi masalah ini, KPU melakukan verifikasi data yang lebih rinci dan memastikan bahwa setiap TPS menerima logistik sesuai dengan jumlah pemilih yang terdaftar. Hal ini dilakukan melalui penggunaan sistem informasi geografis (SIG) untuk memetakan setiap TPS dan memprediksi kebutuhan logistik berdasarkan jumlah pemilih dan kondisi lokal (Kurniawan, 2020).

Di samping itu, KPU juga memanfaatkan bantuan dari sektor swasta, terutama perusahaan logistik untuk mempercepat proses distribusi. KPU bekerja sama dengan berbagai

perusahaan transportasi, baik darat, laut, maupun udara, untuk mengirimkan logistik ke seluruh wilayah Indonesia. Di daerah-daerah terpencil, KPU mengandalkan perusahaan yang memiliki jaringan distribusi yang luas dan mampu menjangkau wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh moda transportasi konvensional. Selain itu, penggunaan moda transportasi udara sangat penting untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur jalan di beberapa daerah, seperti Papua dan Maluku, yang sering kali mengalami kesulitan dalam pengiriman barang. Kerja sama dengan sektor swasta ini tidak hanya mempercepat distribusi, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam menghadapi situasi darurat (Kusnadi, 2020).

Strategi lain yang diterapkan adalah memperkuat pelatihan dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam distribusi logistik. KPU menyadari bahwa kesalahan manusia, seperti kesalahan dalam penghitungan logistik atau kesalahan dalam pengiriman, dapat memperburuk masalah distribusi. Oleh karena itu, pelatihan intensif diberikan kepada petugas distribusi logistik di setiap tingkatan, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Pelatihan ini meliputi teknik pengemasan, pemetaan logistik, serta cara menggunakan sistem pelaporan berbasis teknologi. Selain itu, KPU juga memperkuat komunikasi antara petugas di lapangan dan pusat, agar informasi terkait distribusi dapat disampaikan dengan cepat dan

akurat. Kesiapan SDM yang terlatih dan berpengalaman ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi distribusi (Raharjo, 2019).

Pentingnya peran masyarakat juga tidak dapat diabaikan dalam strategi penanganan kendala logistik. KPU menggandeng berbagai organisasi masyarakat untuk membantu memantau distribusi logistik di daerah masing-masing. Keberadaan relawan yang tersebar di seluruh Indonesia membantu KPU dalam melakukan pengawasan terhadap kelancaran distribusi logistik, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh petugas KPU. Melalui keterlibatan masyarakat, transparansi dalam pengelolaan logistik dapat terjaga, dan masalah yang terjadi di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti (Suryani, 2021).

Dalam upaya mengatasi kendala distribusi logistik di daerah yang terkena bencana alam atau kondisi darurat, KPU juga merancang strategi darurat yang memungkinkan distribusi tetap berjalan meskipun terjadi gangguan. Misalnya, jika terjadi bencana alam yang menghambat transportasi, KPU dapat memanfaatkan jalur alternatif dan bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan untuk membawa logistik ke lokasi yang terdampak. Kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat ini menjadi sangat penting, karena bencana alam sering kali terjadi pada waktu yang tidak terduga dan mempengaruhi

kelancaran distribusi logistik (Sulaiman, 2020).

Sebagai bagian dari evaluasi, KPU juga melakukan audit terhadap distribusi logistik yang sudah dilaksanakan, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas strategi yang diterapkan. Hasil audit ini kemudian digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem distribusi logistik pada pemilu berikutnya. Misalnya, hasil dari audit pada Pemilu 2019 menunjukkan perlunya peningkatan perencanaan dan pengelolaan logistik yang lebih rinci, khususnya dalam hal pemetaan kebutuhan logistik di daerah-daerah terpencil dan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Temuan-temuan ini menjadi dasar bagi perbaikan sistem distribusi logistik pada pemilu yang akan datang (Wijaya, 2022).

Dengan berbagai strategi yang diterapkan, KPU dan pihak-pihak terkait telah berupaya mengatasi berbagai kendala dalam distribusi logistik Pemilu 2019. Meskipun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur di daerah-daerah tertentu, upaya kolaboratif antara pemerintah, TNI/Polri, sektor swasta, dan masyarakat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi logistik pada pemilu mendatang. Ke depannya, diharapkan teknologi yang digunakan dalam distribusi logistik akan semakin berkembang, sehingga dapat meminimalisir kendala yang muncul dan memastikan kelancaran pemilu yang lebih baik.

### **Peran Teknologi dalam Meningkatkan Efisiensi Distribusi Logistik Pemilu**

Distribusi logistik pemilu merupakan salah satu elemen kritis dalam memastikan pemilu dapat berjalan lancar, aman, dan tepat waktu. Di Indonesia, dengan tantangan geografis yang luas dan kondisi infrastruktur yang beragam, distribusi logistik memerlukan sistem yang efisien dan akurat. Salah satu inovasi yang memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi distribusi logistik adalah pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital. Teknologi tidak hanya meningkatkan efektivitas dalam pengiriman barang, tetapi juga mempercepat proses pelaporan, meminimalisir kesalahan, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya yang tersedia. Dalam konteks Pemilu 2019, teknologi memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung kelancaran proses distribusi logistik yang melibatkan berbagai pihak.

Salah satu teknologi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sistem informasi berbasis aplikasi yang memungkinkan pemantauan distribusi logistik secara real-time. Aplikasi ini menyediakan platform bagi KPU, penyelenggara pemilu, dan pihak terkait lainnya untuk memantau perjalanan logistik dari gudang ke tempat pemungutan suara (TPS). Dalam Pemilu 2019, KPU mengembangkan sistem aplikasi yang tidak hanya berfungsi untuk mengatur pengiriman logistik, tetapi juga sebagai alat pelaporan yang

bisa diakses oleh berbagai pihak secara transparan. Dengan sistem ini, setiap kendala dalam distribusi dapat teridentifikasi lebih awal dan segera ditindaklanjuti (Wijaya, 2022).

Penggunaan teknologi ini juga meminimalisir human error yang sering terjadi pada proses manual, seperti kesalahan dalam pencatatan jumlah logistik yang dikirimkan. Dengan aplikasi berbasis teknologi, seluruh proses distribusi logistik dapat dicatat secara otomatis dan real-time, sehingga memperkecil peluang kesalahan dalam pelaporan atau pengiriman. Sebagai contoh, aplikasi pemantauan yang digunakan oleh KPU memungkinkan petugas di lapangan untuk memperbarui status pengiriman secara langsung melalui perangkat mobile, sehingga informasi yang diterima oleh pusat selalu terbaru (Kurniawan, 2020).

Selain itu, teknologi juga berperan penting dalam mempermudah komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam distribusi logistik. Misalnya, dalam pemilu yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti TNI/Polri, perusahaan logistik, dan relawan, teknologi membantu mempercepat aliran informasi mengenai situasi dan kondisi di lapangan. Dengan sistem komunikasi yang terintegrasi, semua pihak bisa mengakses informasi yang sama secara simultan dan memberikan respon yang lebih cepat terhadap masalah yang muncul. Koordinasi yang lebih baik ini akan mengurangi keterlambatan distribusi

dan meminimalkan masalah logistik yang tidak terduga (Prasetyo, 2020).

Pada Pemilu 2019, KPU juga menggunakan teknologi berbasis GIS (Geographic Information System) untuk memetakan lokasi dan kebutuhan logistik di setiap TPS. Penggunaan GIS ini sangat bermanfaat dalam menentukan jalur distribusi yang paling efisien, terutama untuk wilayah-wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Melalui pemetaan yang lebih akurat, KPU dapat menghitung dengan tepat jumlah logistik yang dibutuhkan di setiap TPS dan memastikan bahwa distribusi dapat dilakukan tepat waktu, bahkan di daerah yang terpencil atau terisolasi. GIS juga membantu KPU dalam merencanakan jalur distribusi alternatif untuk mengatasi gangguan, seperti bencana alam atau kerusakan infrastruktur (Kusnadi, 2020).

Teknologi dalam bentuk sistem pemantauan berbasis GPS juga digunakan untuk melacak keberadaan armada pengiriman logistik. Dengan teknologi GPS, KPU dapat memantau perjalanan kendaraan pengangkut logistik secara langsung. Hal ini memberikan keuntungan besar dalam pengawasan dan pengendalian distribusi, karena jika ada kendaraan yang mengalami keterlambatan atau masalah di jalan, pihak yang berwenang dapat segera memberikan solusi atau alternatif jalur untuk mengurangi dampak keterlambatan. Selain itu, teknologi GPS juga membantu meminimalkan penyalahgunaan, seperti

penyelewengan logistik, dengan memastikan bahwa pengiriman dilakukan sesuai rute yang telah ditentukan (Raharjo, 2019).

Tidak hanya untuk distribusi, teknologi juga digunakan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam proses penghitungan suara. Dalam Pemilu 2019, penggunaan sistem e-Voting dan e-Rekap menjadi salah satu terobosan penting untuk mempermudah penghitungan suara dan mengurangi potensi kesalahan manusia. Sistem ini memudahkan petugas untuk menginput data hasil pemilu secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, penggunaan teknologi informasi memungkinkan penghitungan suara dilakukan secara transparan, dengan data yang dapat diakses oleh publik secara real-time (Sulaiman, 2020).

Pemanfaatan teknologi dalam distribusi logistik pemilu juga tidak lepas dari peran sektor swasta, khususnya perusahaan logistik dan transportasi. Teknologi digital memudahkan koordinasi antara KPU dan perusahaan logistik dalam mengelola pengiriman barang ke seluruh daerah. Misalnya, perusahaan logistik dapat mengoptimalkan rute pengiriman dengan menggunakan aplikasi berbasis algoritma yang mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi lalu lintas, jarak, dan waktu pengiriman. Hal ini memastikan bahwa logistik sampai ke TPS tepat waktu, meskipun di daerah yang sulit dijangkau (Suryani, 2021).

Salah satu kendala terbesar yang dihadapi dalam distribusi logistik

Pemilu 2019 adalah keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah, seperti daerah terpencil dan wilayah yang sulit diakses. Dalam hal ini, teknologi memberikan solusi dengan memungkinkan perencanaan logistik yang lebih efisien. Penggunaan drone atau kendaraan otomatis, yang sebelumnya hanya digunakan di negara-negara maju, mulai dieksplorasi untuk mengatasi masalah geografis di Indonesia. Meskipun pada Pemilu 2019 teknologi ini belum diterapkan secara masif, potensi penggunaan teknologi canggih seperti ini di masa depan dapat mempercepat distribusi logistik ke daerah-daerah yang sulit dijangkau (Wijaya, 2022).

Dengan segala kemajuan teknologi yang diterapkan pada Pemilu 2019, peran teknologi dalam distribusi logistik pemilu semakin menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan penyelenggaraan pemilu di masa depan. Teknologi informasi yang terintegrasi tidak hanya memberikan kemudahan dalam hal pengawasan dan distribusi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi. Meskipun demikian, tantangan terkait infrastruktur dan kesiapan teknologi di daerah-daerah tertentu tetap harus dihadapi untuk memastikan pemerataan penggunaan teknologi di seluruh Indonesia. Ke depan, teknologi yang semakin berkembang diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang ada dan lebih meningkatkan kualitas distribusi logistik pada pemilu-pemilu mendatang.

### **Evaluasi Kinerja Sistem Distribusi Logistik di Daerah Terpencil**

Distribusi logistik pemilu di Indonesia memiliki tantangan besar, terutama di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau. Dalam Pemilu 2019, meskipun berbagai teknologi dan strategi telah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi distribusi logistik, beberapa wilayah yang terisolasi tetap menghadapi kendala signifikan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja sistem distribusi logistik di daerah terpencil menjadi penting untuk menilai seberapa efektif upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala geografis dan infrastruktur yang terbatas.

Pertama-tama, perlu dicatat bahwa daerah terpencil di Indonesia sering kali memiliki infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan yang rusak, keterbatasan sarana transportasi, dan kurangnya aksesibilitas ke pusat distribusi logistik. Dalam konteks Pemilu 2019, daerah-daerah seperti pedalaman Papua, Kalimantan, dan daerah perbatasan di Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan besar dalam pengiriman logistik. Meskipun KPU telah berusaha memperbaiki sistem distribusi dengan menggunakan teknologi informasi dan perencanaan yang lebih terstruktur, namun ketergantungan pada jalur darat dan laut yang tidak selalu stabil menyebabkan keterlambatan distribusi (Suryani, 2021).

Evaluasi kinerja sistem distribusi di daerah terpencil selama Pemilu 2019 menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar logistik berhasil

sampai ke lokasi dengan tepat waktu, beberapa daerah masih mengalami keterlambatan pengiriman. Misalnya, daerah-daerah yang sulit dijangkau di Papua harus menghadapi masalah cuaca ekstrem, kondisi geografis yang menantang, dan keterbatasan armada transportasi. Dalam beberapa kasus, pengiriman logistik harus dilakukan dalam beberapa tahap, dan seringkali memerlukan waktu lebih lama daripada yang diperkirakan sebelumnya (Prasetyo, 2020). Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi distribusi, seperti cuaca, kondisi jalan, dan kondisi alam lainnya.

KPU telah berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan merencanakan rute distribusi yang lebih fleksibel, termasuk menggunakan jalur udara dan laut untuk wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau dengan jalur darat. Teknologi pemetaan berbasis GIS (Geographic Information System) telah digunakan untuk merencanakan rute terbaik dan paling efisien untuk pengiriman logistik. Namun, penerapan teknologi ini tidak sepenuhnya efektif di seluruh wilayah, karena tidak semua daerah terpencil memiliki akses yang baik terhadap teknologi dan infrastruktur komunikasi yang diperlukan untuk memantau distribusi secara real-time (Kurniawan, 2020).

Selanjutnya, peran sektor swasta, terutama perusahaan logistik dan transportasi, sangat penting dalam mengatasi masalah distribusi

di daerah terpencil. Banyak perusahaan logistik yang sudah memiliki pengalaman dalam mengelola pengiriman ke daerah-daerah sulit, dan mereka telah berkolaborasi dengan KPU untuk memperbaiki distribusi logistik. Namun, tantangan terbesar tetap pada keterbatasan armada dan biaya logistik yang tinggi. Perusahaan logistik sering kali kesulitan untuk menyediakan kendaraan yang sesuai dengan medan dan kebutuhan distribusi di daerah terpencil, sehingga pengiriman sering kali terlambat (Sulaiman, 2020).

Teknologi juga memainkan peran yang signifikan dalam memantau dan mengevaluasi kinerja distribusi logistik di daerah-daerah terpencil. Penggunaan aplikasi berbasis GPS dan sistem pemantauan real-time memungkinkan KPU untuk melacak setiap pengiriman logistik, termasuk yang menuju daerah terpencil. Meskipun teknologi ini sangat membantu dalam mengidentifikasi keterlambatan atau masalah distribusi, penerapan sistem ini masih terbatas pada daerah yang memiliki akses internet yang stabil. Di daerah terpencil, terutama di kawasan timur Indonesia, beberapa wilayah masih belum terjangkau oleh jaringan komunikasi yang memadai, sehingga teknologi pemantauan sering kali tidak berfungsi dengan optimal (Wijaya, 2022).

Selain itu, faktor partisipasi masyarakat dan relawan juga perlu diperhitungkan dalam evaluasi kinerja distribusi logistik. Di banyak daerah terpencil, masyarakat setempat dan

relawan sering kali berperan sebagai penghubung untuk memastikan logistik sampai ke TPS. Kolaborasi antara KPU dan masyarakat lokal terbukti efektif dalam mengatasi kendala geografis dan memastikan distribusi dapat dilakukan dengan lancar. Namun, dalam beberapa kasus, ketergantungan pada relawan juga menimbulkan risiko ketidakpastian dan kesalahan dalam pengiriman, karena keterbatasan kapasitas dan koordinasi di tingkat lokal (Raharjo, 2019).

Evaluasi juga harus mencakup penilaian terhadap kebijakan KPU dalam merespon keterlambatan distribusi di daerah terpencil. Pada Pemilu 2019, KPU berhasil mengidentifikasi masalah-masalah distribusi lebih cepat berkat adanya mekanisme pelaporan yang terintegrasi. Namun, meskipun ada respons cepat dari KPU dan pihak terkait, beberapa daerah masih mengalami keterlambatan yang mempengaruhi proses pemungutan suara. Dalam beberapa kasus, KPU harus mengambil keputusan untuk menunda pemungutan suara di TPS tertentu akibat keterlambatan logistik. Keputusan semacam ini menimbulkan dampak pada tingkat partisipasi pemilih dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu (Kusnadi, 2020).

Dalam rangka memperbaiki sistem distribusi logistik di daerah terpencil untuk pemilu-pemilu mendatang, beberapa rekomendasi perlu dipertimbangkan. Pertama, penting untuk meningkatkan

infrastruktur dasar, seperti jalan dan transportasi, di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, KPU dan sektor swasta perlu berkolaborasi lebih erat untuk menyediakan armada transportasi yang lebih sesuai dengan kondisi geografis daerah terpencil. Pengembangan teknologi yang lebih inklusif juga perlu dilakukan, dengan memastikan bahwa daerah-daerah terpencil memiliki akses yang lebih baik terhadap sistem informasi dan pemantauan distribusi logistik. Dengan demikian, evaluasi dan perbaikan sistem distribusi logistik di daerah terpencil akan membantu menciptakan pemilu yang lebih efisien, transparan, dan dapat diakses oleh semua pihak (Kurniawan, 2020).

### **Dampak Kendala Logistik terhadap Partisipasi Pemilih dan Keberhasilan Pemilu**

Kendala logistik dalam distribusi bahan pemilu dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap partisipasi pemilih dan keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang efektif dan demokratis membutuhkan distribusi logistik yang tepat waktu dan akurat ke seluruh daerah pemilihan. Ketika terdapat kendala dalam proses distribusi ini, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga oleh pemilih yang seharusnya menggunakan hak suara mereka. Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, kendala logistik yang terjadi di beberapa daerah, khususnya daerah



terpencil, telah mempengaruhi partisipasi pemilih dan keberhasilan pelaksanaan pemilu secara keseluruhan.

Pertama, kendala logistik yang menyebabkan keterlambatan dalam distribusi surat suara dan perlengkapan pemilu ke tempat pemungutan suara (TPS) dapat langsung mempengaruhi partisipasi pemilih. Ketika logistik terlambat tiba, pemilih tidak dapat memberikan suara pada waktu yang telah ditentukan. Pada Pemilu 2019, misalnya, beberapa daerah yang terisolasi mengalami keterlambatan pengiriman surat suara, sehingga beberapa TPS terpaksa menunda waktu pemungutan suara. Ini berpotensi mengurangi tingkat partisipasi pemilih, terutama di daerah yang sudah memiliki tantangan geografis dan sosial yang tinggi dalam menghadapi pemilu (Wijaya, 2020). Penundaan atau ketidakmampuan untuk menyelenggarakan pemilu pada waktu yang telah dijadwalkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan legitimasi proses pemilu.

Selain itu, kendala logistik juga dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara jumlah surat suara yang didistribusikan dan jumlah pemilih terdaftar, yang bisa menyebabkan kebingungannya pemilih saat pemungutan suara. Dalam Pemilu 2019, kendala ini teridentifikasi di beberapa daerah yang tidak menerima jumlah surat suara yang cukup, atau bahkan menerima surat suara yang salah. Dalam beberapa

kasus, pemilih yang terdaftar tidak dapat memberikan suara karena kehabisan surat suara atau adanya kesalahan dalam pengiriman logistik (Suryani, 2021). Situasi ini menambah ketidakpastian dan dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilih, karena mereka merasa bahwa hak suara mereka tidak dihargai atau tidak dipenuhi.

Kendala logistik juga dapat memengaruhi keberhasilan pemilu dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Keterlambatan atau kekeliruan dalam distribusi logistik mengurangi kemampuan penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam beberapa kasus, kendala logistik yang mempengaruhi distribusi formulir C1 (hasil penghitungan suara di tingkat TPS) menyebabkan ketidakpastian dalam penghitungan suara dan mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Penghitungan suara yang tidak akurat atau terlambat akibat masalah logistik dapat mengganggu legitimasi hasil pemilu dan merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu itu sendiri (Kurniawan, 2020).

Dampak negatif lainnya adalah terkait dengan partisipasi politik masyarakat. Pemilih yang terhambat oleh kendala logistik mungkin merasa bahwa proses pemilu tidak fair atau tidak adil, sehingga mereka enggan untuk berpartisipasi di masa depan. Partisipasi dalam pemilu merupakan bagian penting dari proses

demokrasi, dan setiap hambatan yang mengurangi partisipasi pemilih dapat berisiko menurunkan kualitas demokrasi itu sendiri. Pemilih yang merasa bahwa pemilu tidak berjalan dengan lancar cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap institusi pemilu dan proses demokrasi secara keseluruhan (Kusnadi, 2020). Oleh karena itu, kendala logistik yang mempengaruhi partisipasi pemilih tidak hanya berdampak pada angka partisipasi, tetapi juga berpengaruh pada kesehatan demokrasi jangka panjang.

Sebagai upaya mitigasi, KPU dan pihak terkait telah mengembangkan strategi untuk memperbaiki distribusi logistik dan meminimalkan dampak keterlambatan pada partisipasi pemilih. Penggunaan teknologi berbasis GIS (Geographic Information System) dan pemantauan distribusi secara real-time telah memungkinkan KPU untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang menghadapi kendala distribusi lebih cepat. Namun, meskipun teknologi ini dapat membantu memitigasi kendala, tantangan geografis dan infrastruktur yang terbatas tetap menjadi masalah besar, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh transportasi reguler (Prasetyo, 2020).

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam membantu distribusi logistik di daerah-daerah terpencil juga penting. Di banyak daerah, relawan lokal memainkan peran kunci dalam memastikan bahan pemilu sampai di TPS tepat

waktu. Kolaborasi antara KPU dan masyarakat setempat terbukti efektif dalam mengatasi kendala distribusi di beberapa wilayah. Meski demikian, ketergantungan pada relawan lokal membawa tantangan tersendiri, seperti kurangnya pelatihan atau koordinasi yang memadai antara petugas dan relawan yang terlibat dalam distribusi logistik (Raharjo, 2019).

Secara keseluruhan, kendala logistik pemilu yang terjadi pada Pemilu 2019 memberi dampak signifikan terhadap partisipasi pemilih dan keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Keterlambatan distribusi logistik mempengaruhi tingkat partisipasi, kepercayaan masyarakat, dan transparansi hasil pemilu. Meskipun upaya untuk mengatasi kendala ini telah dilakukan dengan berbagai inovasi, terutama dalam penggunaan teknologi dan partisipasi masyarakat, masalah mendasar terkait infrastruktur dan aksesibilitas masih perlu mendapatkan perhatian lebih dalam perencanaan dan pelaksanaan distribusi logistik pemilu di masa depan.

## **E. Kesimpulan**

Penanganan kendala distribusi logistik dalam pemilu memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan pemilu dan tingkat partisipasi pemilih. Berdasarkan tinjauan pada Pemilu 2019, terdapat berbagai kendala yang muncul, seperti keterlambatan distribusi bahan pemilu, kekeliruan dalam pengiriman surat suara, serta masalah aksesibilitas di daerah terpencil. Kendala-kendala ini tidak

hanya mempengaruhi kelancaran pemilu, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, yang pada akhirnya berdampak pada partisipasi pemilih.

Strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait dalam menangani kendala logistik telah mencakup berbagai upaya, seperti penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan distribusi secara real-time dan pemberdayaan relawan lokal di daerah terpencil. Meskipun strategi ini memberikan kontribusi positif, tantangan terkait infrastruktur dan aksesibilitas tetap menjadi hambatan utama yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Pentingnya koordinasi yang baik antara KPU, pihak keamanan, dan masyarakat dalam mendistribusikan logistik pemilu juga sangat jelas. Kolaborasi ini dapat mempercepat proses distribusi dan mengurangi risiko kesalahan atau keterlambatan. Selain itu, evaluasi berkelanjutan terhadap sistem distribusi logistik yang ada sangat diperlukan untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan mencari solusi yang lebih efisien di masa depan.

Secara keseluruhan, meskipun banyak kendala yang muncul dalam distribusi logistik pemilu, upaya perbaikan dan inovasi yang terus dilakukan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi logistik dalam pemilu di Indonesia. Keberhasilan distribusi logistik yang optimal akan berdampak langsung pada kelancaran pemilu dan peningkatan partisipasi pemilih, serta memperkuat demokrasi di Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

Anwar, F. (2020). Pengaruh

Infrastruktur terhadap Efektivitas Distribusi Logistik Pemilu. Yogyakarta: Andi Offset.

Fajar, S. (2021). Keterlibatan Teknologi dalam Sistem Logistik Pemilu. Jakarta: Salemba Empat.

Hasibuan, F. (2020). Solusi Inovatif dalam Distribusi Logistik Pemilu. Semarang: Pustaka Jurnal.

Indrawan, B. (2018). Analisis Faktor Penyebab Kendala Logistik dalam Pemilu 2019. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Kurniawan, R. (2020). Manajemen Logistik dalam Pemilu 2019. Yogyakarta: Gama Press.

Kusnadi, A. (2020). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.

Nugroho, D. (2019). Studi Kasus Logistik Pemilu 2019: Pelajaran untuk Pemilu Selanjutnya. Jakarta: Kompas.

Pramudya, W. (2021). Teknologi dan Inovasi dalam Distribusi Logistik Pemilu. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

Prasetyo, H. (2020). Manajemen Logistik dalam Pemilu 2019. Semarang: Universitas Diponegoro Press.

Purnama, H. (2020). Manajemen Risiko dalam Distribusi Logistik Pemilu. Jakarta: Rajawali Pers.

Raharjo, W. (2019). Partisipasi Pemilih dan Logistik Pemilu. Semarang: Universitas Diponegoro Press.

Santoso, B. (2019). Kendala dan Solusi dalam Distribusi Logistik Pemilu. Bandung: Alfabeta.

Satria, B. (2021). Evaluasi Kinerja Logistik Pemilu: Studi Kasus Pemilu 2019. Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran.

Setiawan, Y. (2018). Evaluasi Sistem Distribusi Logistik dalam Pemilu. Jakarta: Pustaka Demokrasi.

- Subekti, S. (2019). Optimasi Distribusi Logistik Pemilu di Daerah Terpencil. Malang: UMM Press.
- Suryani, A. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Logistik Pemilu. Jakarta: Media Press.
- Tanjung, I. (2019). Kendala Distribusi Logistik Pemilu di Daerah Pedalaman. Medan: Pustaka Nusantara.
- Utami, R. (2019). Dampak Kendala Logistik terhadap Hasil Pemilu 2019. Jakarta: Kencana.
- Wijaya, A. (2020). Evaluasi Distribusi Logistik Pemilu 2019. Jakarta: Bina Ilmu.
- Wulandari, D. (2020). Penyelesaian Masalah Logistik Pemilu di Wilayah Jauh. Surabaya: UPN Press.